



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar desa dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dari Menteri Dalam Negeri.
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Pedoman dan Penetapan Alokasi Dana Desa serta pelaksanaannya di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengesahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor : 14) ;

19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor : 19)

MEMUTUSKAN

menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah ;
7. Camat adalah kepala diwilayah kecamatan ;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah Desa dilingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa ;
12. Alokasi Dana Desa dimaksud untuk membiayai Program Desa Membangun yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud, tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD)

- (1). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Pemerintah Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Katingan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2). Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - c. Meningkatkan penerimaan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa.
 - d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (3). Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
- a. Meningkatnya epektipitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa.
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
 - d. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III AZAS YANG DIANUT ADD

Pasal 3

- (1). Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan azas merata dan adil
 - Azas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
 - Azas Adil, adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara Proporsional untuk setiap Desa Berdasarkan nilai bobot desa (BD x) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa Variabel yaitu : Kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan jumlah dusun, selanjutnya disebut dana proposional (ADDP).
- (2). Berdasarkan kedua azas tersebut diatas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADD x) terdiri dari 2 (dua) komponen yang Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP x).

$$ADD x = ADDM + ADDP x$$

Keterangan :
ADD x : **Alokasi Dana Desa untuk Desa x**
ADDM : **Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa**
ADDPx : **Alokasi Dana Desa P**

BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman pelaksanaan dan penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2009 sebagaimana termuat dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Pedoman Alokasi Dana Desa digunakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan Program Desa Membangun (PDM) yang menggunakan sumber pendanaan dari Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB V PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1). Total Alokasi Dana Desa sebesar 4,5% berasal dari dana alokasi umum setelah dikurangi alokasi dasar untuk belanja Pegawai Negeri Sipil, dibagi secara proporsional kepada setiap Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa untuk 154 (Seratus lima puluh empat) desa di Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 15.500.000.000,- (Lima belas milyar lima ratus juta rupiah) yang pembagiannya untuk masing - masing Desa tertuang dalam lampiran 2 (dua) Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi Dana Desa berdasarkan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dimana untuk ADDM sebesar Rp. 6.976.200.000,- (Enam Milyard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari total ADD dan untuk ADDP sebesar Rp. 8.523.650.000,- (Delapan Milyard Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) dari total ADD secara keseluruhan.

BAB VI PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing – masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan rumus – rumus sebagai berikut :

- a. Rumus Alokasi Dana Desa (x) tahun anggaran 2009 (Pemerataan dan Keadilan) :
$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
 $ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
 $ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
X = Desa

- b. Rumus untuk menentukan pembagian dana proporsional :
 $ADDP_x = \text{Klasifikasi Desa (A, B atau C)}$

Keterangan :
Klasifikasi Desa A = Rp. 120.680.000,-
Klasifikasi Desa B = Rp. 106.180.000,-
Klasifikasi Desa C = Rp. 90.700.000,-

- c. Klasifikasi Desa A yaitu jumlah penduduknya 1001 jiwa keatas
Kalsifikasi Desa B yaitu jumlah penduduknya 501 – 1000 jiwa
Kalsifikasi Desa C yaitu jumlah penduduknya 0 - 500 jiwa

Kalsifikasi Desa berdasarkan Keputusan gubernur Kalimantan Tengah Nomor 163 Tahun 2005, sedangkan besarnya ADDP untuk klasifikasi desa disesuaikan dengan jumlah dana yaitu 55 % dari alokasi Dana Desa.

- (2). Hasil perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing – masing Desa yang besarnya pada tiap Desa sesuai dengan klasifikasi Desa secara proporsional yang nilainya sebagaimana lampiran 2 (dua) Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

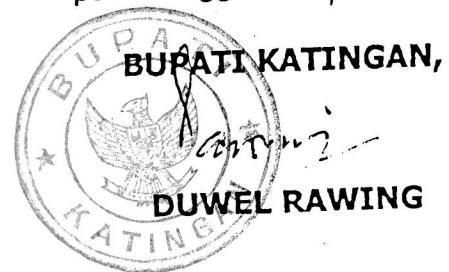
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 17 April 2009



D Di undangkan di Kasongan
P pada tanggal, 29 April 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**

CHRISTANTWO TATEL LADJU

BI BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR :

LAMPIR : ALOKASI DANA DESA (ADD) YANG DITERIMA OLEH SETIAP DESA DI KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DISESUAIKAN DENGAN KRITERIA DESA.

| NO | Kecamatan/Desa | Jumlah Penduduk | Klasifikasi Desa | Dana Operasional Desa/BPD | Dana Kegiatan Fisik | Jumlah Dana |
|-----|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | KATINGAN KUALA | | | 634,200,000 | 860,940,000 | 1,495,140,000 |
| 1 | JAYA MAKMUR | 2.985 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 2 | SUBUR INDAH | 2.917 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 3 | KAMPUNG KERAMAT | 1.125 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 4 | SINGAM RAYA | 893 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 5 | BANGUN JAYA | 2.105 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 6 | KAMPUNG TENGAH | 1.696 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 7 | KAMPUNG BARU | 1.878 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 8 | SETIA MULIA | 1.453 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 9 | SEBANGAU JAYA | | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 10 | SUNGAI KAKI | | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 11 | SELAT BANING | | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 12 | MAKMUR UTAMA | | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 13 | BUMI SUBUR | | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 14 | BAKUNG RAYA | | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| II | MENDAWAI | | | 317,100,000 | 454,180,000 | 771,280,000 |
| 1 | TELUK SEBELU | 360 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 2 | MENDAWAI | 1.159 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 3 | KAMPUNG MELAYU | 1.319 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 4 | TEWANG KAMPUNG | 734 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 5 | MEKAR TANI | 987 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 6 | PARIGI | 772 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 7 | TUMBANG BULAN | 1.024 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| III | KAMIPANG | | | 407,700,000 | 544,980,000 | 952,680,000 |
| 1 | GALINGGANG | 1.631 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 2 | TAMPELAS | 573 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 3 | TELAGA | 1.166 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 4 | PERUPEK | 120 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 5 | KARUING | 495 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 6 | JAHANJANG | 676 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 7 | TUMBANG RUNEN | 461 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 8 | BAUN BANGO | 756 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 9 | ASEM KUMBANG | 1.368 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| IV | TASIK PAYAWAN | | | 362,400,000 | 485,080,000 | 847,480,000 |
| 1 | TALINGKE | 722 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 2 | HYANG BANA | 90 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 3 | PETAK BAHANDANG | 1.435 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 4 | HANDIWUNG | 713 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 5 | TUMBANG PANGGO | 772 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 6 | TEWANG TAMPANG | 885 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 7 | LUWUK KANAN | 1.384 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 8 | LUWUK KIRI | 333 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| V | KATINGAN HILIR | | | 271,800,000 | 393,300,000 | 665,100,000 |
| 1 | TEWANG KADAMBA | 489 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 2 | TUMBANG LITING | 725 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 3 | TALIAN KERENG | 1.312 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 4 | BANUT KALANAMAN | 750 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 5 | TELANGKAH | 2.068 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 6 | HAMPALIT | 8.153 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| VI | Tewang Sangalang Garing | | | 407,700,000 | 530,480,000 | 938,180,000 |
| 1 | TEWANG BARINGIN | 1.129 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 2 | HAMPALAM | 722 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 3 | TEWANG RANGAS | 433 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 4 | BANGKUANG | 437 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 5 | TARUSAN DANUM | 572 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 6 | TUMBANG TARUSAN | 660 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 7 | TEWANG RANGKANG | 1.565 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 8 | TEWANG MANYANGEN | 772 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 9 | KARYA UNGGANG | | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |

Sambang
19680525 200604 1 010

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-------------------------|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| VII | PULAU MALAN | | | 634,200,000 | 742,980,000 | 1,377,180,000 |
| 1 | TEWANG PAPARI | 457 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 2 | TEWANG DARAYU | 591 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 3 | BUNTUT BALI | 621 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 4 | KULUK BALI | 286 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 5 | MANDUING TAHETA | 208 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 6 | MANDUING LAMA | 334 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 7 | TUMBANG BANJANG | 440 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 8 | TUMBANG LAWANG | 307 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 9 | DAHIAN TUNGGAL | 1.026 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 10 | TEWANG KARANGAN | 505 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 11 | TUMBANG TUNGKU | 618 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 12 | GERAGU | 354 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 13 | TUMBANG TANJUNG | 590 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 14 | TURA | 255 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| VIII | KATINGAN TENGAH | | | 679,500,000 | 952,780,000 | 1,632,280,000 |
| 1 | MIRAH KALANAMAN | 1.466 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 2 | TUMBANG LAHANG | 1.275 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 3 | TEWANG PANJANG | 240 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 4 | PETAK PUTI | 158 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 5 | TELOK | 1000 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 6 | SAMBA DANUM | 3.872 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 7 | SAMBA BAKUMPAI | 1617 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 8 | SAMBA KATUNG | 2.049 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 9 | NAPU SAHUR | 280 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 10 | BATU BADINDING | 1.115 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 11 | RANTAU ASEM | 789 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 12 | TUMBANG KALAMEI | 772 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 13 | TUMBANG MARAK | 702 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 14 | TUMBANG HANGEI | 697 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 15 | TUMBANG PARIEI | 341 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| IX | SANAMAN MANTIKEI | | | 634,200,000 | 755,520,000 | 1,389,720,000 |
| 1 | DEHES | 181 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 2 | TUMBANG LABEHU | 239 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 3 | TUMBANG MANGGO | 2.568 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 4 | KAMANTO | 239 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 5 | KULUK HABUHUS | 495 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 6 | TUMBANG KANEI | 307 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 7 | TUMBANG TARANEI | 303 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 8 | TUMBANG KAWEI | 272 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 9 | TUMBANG MANGGARA | 220 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 10 | TUMBANG PANGKA | 220 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 11 | TUMBANG ATEI | 1.123 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 12 | TUMBANG KAMAN | 1.439 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| 13 | DAYA MANUNGGAL | 388 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 14 | RANTAU BANGKIANG | 1223 | A | 45,300,000 | 75,380,000 | 120,680,000 |
| X | PETAK MALAI | | | 317,100,000 | 364,240,000 | 681,340,000 |
| 1 | TUMBANG BARAOI | 865 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 2 | BATU TUKAN | 436 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 3 | TUMBANG TANGOI | 327 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 4 | TUMBANG JALA | 826 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 5 | BATU BADAQ | 138 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 6 | NUSA KUTAU | 438 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 7 | TUMBANG HABANGOI | 954 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| XI | MARIKIT | | | 815,400,000 | 879,120,000 | 1,694,520,000 |
| 1 | TUMBANG MANDUREI | 225 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 2 | TUMBANG PAKU | 538 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 3 | BUNTUT LELENG | 353 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 4 | RANGAN SUREI | 415 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 5 | TUMBANG HIRAN | 789 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 6 | TUMABNG PAHANEI | 507 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 7 | TUMBANG DAKAI | 454 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 8 | RANGAN BURIH | 204 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 9 | TUMBANG BEMBAN | 376 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 10 | TUMBANG LAMBI | 148 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 11 | RANGAN TANGKO | 624 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 12 | TUMBANG TAEI | 107 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 13 | TUMBANG MALAWAN | 206 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 14 | SEBAUNG | 210 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 15 | TUMBANG TUNDU | 85 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 16 | TUMBANG TABULUS | 345 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 17 | BATU PANAHAN | 130 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 18 | KULUK LELENG | 126 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |

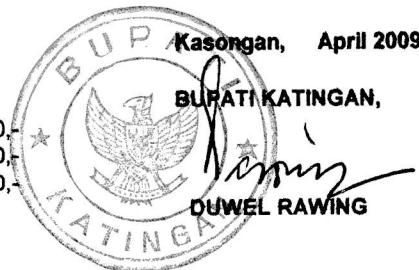
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|-----|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| XII | KATINGAN HULU | | | 996,600,000 | 1,029,760,000 | 2,028,360,000 |
| 1 | RANGAN RANJING | 119 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 2 | TUMBANG LABANING | 423 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 3 | BATU BANGO | 99 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 4 | PENDA TANGGARING LAMA | 172 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 5 | PENDA TANGGARING BARI | 290 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 6 | TUMBANG HANGEI II | 359 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 7 | TUMBANG JIGA | 418 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 8 | TUMBANG KABAYAN | 87 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 9 | TUMBANG MANGKETAJ | 231 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 10 | TUMBANG MANANGEI | 149 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 11 | TUMBANG SABETUNG | 93 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 12 | TUMBANG MAHOP | 868 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 13 | SEI NANJAN | 178 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 14 | RANTAU BAHAI | 835 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 15 | RANTAU PUKA | 273 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 16 | TELOK TAMPANG | 98 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 17 | TUMBANG SALAMAN | 230 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 18 | TUMBANG KUI | 148 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 19 | KULUK SEPANGI | 169 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 20 | DEHES ASEM | 129 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 21 | RANGAN KAWIT | 229 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 22 | KIHAM BATANG | 189 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| XII | BUKIT RAYA | | | 498,300,000 | 530,360,000 | 1,028,660,000 |
| 1 | TUMBANG KATEI | 79 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 2 | TUMBANG DUHUEI | 275 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 3 | RANTAU PANDAN | 332 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 4 | TUMBANG GAEI | 364 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 5 | PENDA NANGE | 91 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 6 | RANGAN RONDAN | 137 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 7 | RANGAN BAHEKANG | 93 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 8 | TUMBANG KAJAMEI | 597 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| 9 | TUMBANG KARUEI | 389 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 10 | TANJUNG BATIK | 157 | C | 45,300,000 | 45,400,000 | 90,700,000 |
| 11 | TUMBANG KABURAI | 792 | B | 45,300,000 | 60,880,000 | 106,180,000 |
| | | | | 6,976,200,000 | 8,523,720,000 | 15,499,920,000 |

KETERANGAN : KELURAHAN TIDAK MENERIMA ADD.

KRITERIA DESA PENERIMA ADD ADALAH :

- Kriteria A = 32 Desa x Rp.120.680.000,- =
- Kriteria B = 37 Desa x Rp.106.180.000,- =
- Kriteria C = 85 Desa x Rp.90.700.000,- =

Rp.3.861.760.000,-
Rp.3.926.660.000,-
Rp.7.709.500.000,-



**LAMPIRAN : I PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PROGRAM DESA MEMBANGUN (PDM)
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2009**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu yang sangat mendasar dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Katingan yaitu cukup tingginya angka jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan Tahun 2008, maka jumlah penduduk miskin yaitu 10.54 % Kepala Keluarga. Selanjutnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruhnya tahun 2008 maka ± 32 % adalah penduduk miskin.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Katingan, telah ditetapkan 3 (tiga) strategi yaitu a). Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin b). Meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kegiatan usaha ekonomi produktif dan c). Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan/kursus, magang yang berbasis masyarakat.

Berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diatas, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 tahun 2005 tentang Desa yang dijabarkan lebih lanjut dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 140/640/SJ, tanggal 22 maret 2005, perihal alokasi dana desa (ADD).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut diatas butir 4.b ayat 1, menyatakan bahwa sumber dana alokasi desa yaitu dari bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Kabupaten/kota.

Untuk pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan melalui program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Katingan maka pada tahun 2009 mengalokasi dana desa yang cukup besar yang tertuang dalam Program Alokasi Dana Desa yang akan dipergunakan untuk pembiayaan Program Desa Membangun (PDM) tersebar pada 13 Kecamatan dan 154 Desa.

B. Tujuan

Penetapan kebijakan pembangunan melalui Program Desa Membangun dengan pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) baik dalam bentuk Bantuan Desa maupun dalam bentuk dana alokasi langsung dengan memperhatikan faktor kemiskinan, pendidikan, kesehatan serta keterjangkauan dan ketersediaan imprastruktur dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai dan melaksanakan pelayanan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Memberikan motivasi swadaya dan gotong - royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
3. Mengembangkan inisiatip dan prakarsa Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk membangun desa.
4. Meningkatkan dan mengefektipkan peranan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pedesaan.
5. Mengembangkan sektor - sektor yang produktif berskala desa dan mendukung peningkatan usaha masyarakat desa sehingga memberikan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara merata.

II. Sumber dan Alokasi Dana

A. Sumber Dana

Sumber dana untuk Program Desa Membangun baik dalam bentuk bantuan desa maupun alokasi langsung sebagai berikut :

1. Bagi hasil pajak daerah dan distribusi daerah
2. Dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

~~B. Alokasi Dana.~~

Dalam mengalokasikan dana desa, dihitung dengan prosentase yaitu \pm 4,5 % dari jumlah dana yang diterima oleh Kabupaten Katingan baik bersumber dari pajak dan retribusi daerah maupun dana perimbangan dari pusat setelah dikurangi gaji Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian dari seluruh dana dimaksud yaitu 45% yang dialokasikan merata bagi seluruh desa, sedangkan 55% berupa dana tambahan bagi desa

kemiskinan, keterjangkauan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesehatan, transportasi/komunikasi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Sehingga dengan demikian, maka masing - masing desa akan menerima dana, dengan jumlah yang berbeda/tidak sama.

III. Penggunaan Dana Desa.

Dari jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan oleh pemerintah desa untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa dengan prosentase peruntukan sebagai berikut :

1. 45% digunakan untuk belanja operasional aparatur desa dan Honorarium/gaji lainnya dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya Operasional Desa, Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Biaya Operasional PKK Desa dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Operasional Desa sebesar Rp. 7.000.000,-
- Biaya Operasional PKK Desa sebesar Rp. 5.000.000,-
- Biaya Operasional BPD sebesar Rp. 3.000.000,-
- Biaya Operasional TPPK PDM Rp. 1.500.000,-

b. Untuk kesejahteraan Kepala Desa beserta aparatnya diberikan Honorarium/Gaji, yaitu sebagai berikut :

- Kepala Desa sebesar Rp. 550.000,-/bulan
- Sekretaris Desa sebesar Rp. 500.000,-/bulan
- Kaur/Kepala Seksi masing-masing sebesar Rp. 450.000,-/bulan

c. Jumlah dana tiap Desa yang diperuntukan untuk Biaya Operasional Desa sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Honorarium/Gaji Aparatur Desa 5 (lima) orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 3 (tiga) orang Kepala urusan sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per Tahun.

2. 55% digunakan untuk belanja publik yang meliputi :

- Program penanggulangan kemiskinan
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Peningkatan pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat.
- Pengadaan pembangunan infrastruktur pedesaan seperti sarana perhubungan, sarana produksi, dan prasarana sosial desa lainnya.

IV. Cakupan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Desa Membangun (PDM) berupa kegiatan fisik sarana dan prasarana Desa yang diperlukan sesuai dengan hasil musyawarah Desa dilaksanakan oleh masyarakat, baik dengan sistim upah/gaji maupun secara swadaya dan gotong royong.

V. Batasan Kegiatan

Dalam penggunaan dana program Desa Membangun tidak diperbolehkan untuk hal - hal sebagai berikut :

1. Membangun yang bersifat prestise, antara lain seperti tugu Desa, pemugaran tempat keramat dan gapura Desa.
2. Membangun pada tanah bukan milik Desa kecuali sudah dihibahkan (dilengkapi dengan keterangan hibah).
3. Tumbang tindih dengan proyek/kegiatan lain seperti Program PPK, P2LDT, P2P, P2DTK dan lain - lain. ✓
4. Pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa Menjadi Tanggung Jawab Kabupaten.
5. Dilarang membeli Tanah untuk Lokasi Kuburan.

VI. Tahapan Kegiatan.

Program Desa Membangun tahun anggaran 2009 dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Dana PDM yang langsung diterima Desa.
 - Untuk biaya PDM yang langsung diterima Desa melalui APB Desa, dengan cara mengajukan Rencana Pengeluaran Desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang telah disahkan oleh Camat dan diajukan kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan. (**Contoh format terlampir**).
 - Untuk Honor/Gaji Kepala Desa dan Perangkatnya diajukan **Semester** dengan beban Ls.
2. Dana PDM untuk kegiatan fisik dilaksanakan dalam tahapan - tahapan sebagai berikut :
 - **Tahapan Pertama**
 - a. Desa membentuk Tim Perencana dan Pelaksana Kegiatan (TPPK) melalui Musyawarah Desa dan dipilih dari anggota masyarakat baik laki - laki maupun perempuan yang dipandang memiliki

kemampuan dan dedikasi dalam memajukan desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, disahkan oleh BPD dan diketahui oleh Camat.

b. Susunan Pengurus TPPK Desa terdiri dari :

- Ketua
- Sekretaris merangkap anggota
- Bendahara
- Anggota (4 orang).

c. Kriteria Memilih TPPK Desa.

- Berkemampuan membaca, menulis dan bersemangat.
- Bersedia mencurahkan waktu dan perhatian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam musyawarah.
- Jujur dan berdedikasi tinggi.
- Mampu berkomunikasi dengan baik.
- Kepala Desa dan Ketua BPD serta aparatnya tidak diperkenankan menjadi Anggota dan atau Ketua TPPK.

- Tahapan Kedua

1. Perencanaan Kegiatan

- a. TPPK Desa menjaring aspirasi kelompok - kelompok masyarakat mentabulasikannya, sebagai bahan untuk menyusun 2 (dua) atau 3 (tiga) rencana kegiatan prioritas yang akan diajukan dalam musyawarah Desa. (**Format I terlampir**).
- b. Hasil musyawarah Desa dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Keputusan Desa, kemudian diajukan ke Kelompok Kerja di Kecamatan (POKJA Kecamatan). (**Format II, III, IV, V terlampir**).
- c. Pokja Kecamatan meneliti dan memverifikasi rencana kegiatan Desa, (Pokja Kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggotanya terdiri dari unsur Dinas/Instansi terkait yang ada di Kecamatan, Tokoh Masyarakat, LSM dan Perwakilan Desa yang ditunjuk oleh Desa yang ditetapkan dengan keputusan Camat).
- d. Hasil Verifikasi Pokja Kecamatan mengenai usulan kegiatan Desa yang layak untuk dilaksanakan diajukan kepada Bupati Katingan Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan atau Pokja Kabupaten untuk mendapat persetujuan dan permintaan dana PDM, dengan melampirkan Formulir Verifikasi Usulan. (**Format terlampir**)
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan atau Pokja Kabupaten Katingan meneliti dan memverifikasi ulang

dan menceklis dokumen usulan yang diajukan untuk ditindak lanjuti dan membuat rencana anggaran biaya, dengan menggunakan jasa konsultan khusus/Instansi Teknis terkait dan sekaligus menjadi pengawas teknis di desa.

2. Pelaksanaan Kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan PDM tahun anggaran 2009 tidak terlepas dari tanggung jawab Kepala Desa bersama dengan TPPK Desa serta masyarakat pada umumnya sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan fungsinya masing - masing sebagai berikut :

a. Tugas dan fungsi Kepala Desa.

- 1). Menyebarluaskan informasi melalui spanduk/papan pengumuman Desa tentang Program Desa Membangun kepada masyarakat sebelum TPPK Desa dibentuk.
- 2). Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa untuk membentuk TPPK Desa.
- 3). Menyelenggarakan musyawarah desa dalam menyusun rencana kegiatan desa.
- 4). Membantu TPPK Desa dalam menyusun perincian rencana kegiatan dan menyusun jadwal kegiatan serta membantu membuat dokumen - dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pencairan dana.
- 5). Membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan PDM.
- 6). Menangani pengaduan masyarakat.
- 7). Bertanggung jawab terhadap seluruh pengeluaran sebagai akibat dari pengeluaran keuangan desa.

b. Fungsi dan Tugas BPD.

- 1). Membantu mensosialisasi kegiatan PDM kepada masyarakat.
- 2). Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan PDM sesuai dengan rencana kegiatan.
- 3). Memberikan masukan dan saran tentang pelaksanaan PDM, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.
- 4). Membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan PDM.
- 5). Menangani pengaduan masyarakat.

c. Fungsi dan Tugas TPPK Desa.

c. Fungsi dan Tugas TPPK Desa.

- 1). Melakukan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat tentang setiap tahapan kegiatan PDM melalui papan pengumuman.
- 2). Menjaring aspirasi masyarakat dengan melaksanakan Penggalan Gagasan pada tingkat Dusun/Kelompok Masyarakat pemanfaat.
- 3). TPPK Desa menyusun 2 (dua) atau 3 (tiga) draf rencana kegiatan prioritas dan diajukan dalam musyawarah Desa (Musrendes).
- 4). Menyediakan data informasi mengenai PDM, seperti Petunjuk Pelaksanaan, Surat Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana PDM, serta informasi kemajuan kegiatan PDM.
- 5). Dengan dibantu Kepala Desa dan BPD menyusun jadwal kegiatan, membuat rencana kegiatan dan mengkoordinir masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PDM.
- 6). Melaksanakan kegiatan pembangun dan memelihara sarana dan prasarana Desa bersama - sama dengan masyarakat.
- 7). Dengan dibantu Kepala Desa, membuat dokumen pelaksanaan dan mengajukan dokumen pencairan dana.
- 8). Mengidentifikasi masalah - masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan untuk dibahas pada musyawarah Desa.
- 9). Melakukan administrasi keuangan.
- 10). Menangani pengaduan masyarakat.
- 11). Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, setelah diperiksa dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa atau Pokja Kabupaten.

3. Pembinaan Dan Pengawasan.

- a. Pembinaan pelaksanaan kegiatan secara fungsional dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau oleh Pokja Tingkat Kabupaten di bantu oleh Camat lokasi pelaksanaan kegiatan.

- Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan
- BPD Desa serta tokoh masyarakat setempat
- Camat dan Pokja Kecamatan
- Konsultan teknis.

4. Pelaporan.

1. Dana Program Desa Membangun yang langsung diterima Desa. Alokasi Dana Desa yang langsung diterima oleh Desa melalui rekening desa wajib dilaporkan pada tiap tahun anggaran, dan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, yang tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Katingan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.
2. Dana yang diterima untuk pelaksanaan kegiatan fisik. Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap yaitu : **Tahap Pertama**, setelah pekerjaan fisik dan keuangan 35 % dan **Tahap Kedua**, setelah pekerjaan fisik dan keuangan selesai 100%. Pelaksanaan dilaksanakan secara berjenjang, disampaikan kepada Bupati Katingan Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten Katingan setelah diketahui oleh Camat setempat. Laporan dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan rincian masing - masing, asli untuk Bupati, tembusan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan, Kecamatan dan Kepala Desa. (Laporan dibuat pada saat mengajukan SPP tahap berikutnya) yang sekaligus menjadi salah satu persyaratan yang dilampirkan.

VII. Proses Pencairan Dana Program Desa Membangun.

Proses pencairan dana Program Desa Membangun baik program Bantuan Desa maupun kegiatan pembangunan lainnya yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

1. Dana Yang Diterima Langsung.

Untuk permintaan dana bantuan langsung 100% berupa biaya operasional, maka Kepala Desa mengajukan permintaan dana yang diketahui oleh Camat untuk diajukan kepada Bupati Katingan untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan, dengan melampirkan :

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- Nomor Rekening Desa di BPK setempat.
- Surat Keputusan Kepala Desa tentang PJAK dan PJOK.
- Kuitansi tanda terima bermeterai (tanda bukti pembayaran yang syah).
- Untuk honorarium aparatur desa, dibayarkan 2 (dua) tahap yaitu Semester I, Semester II, dengan melengkapi :
 - a. Semester Pertama (6 bulan).
 - . Kuitansi NCR bermeterai yang tanda terimanya ditandatangani oleh PJAK
 - . Daftar tanda terima ditandatangani oleh aparatur desa diketahui oleh camat.
 - b. Semester Kedua (12 bulan).
 - . Kuitansi NCR bermeterai yang tanda terimanya ditandatangani oleh PJAK
 - . Daftar tanda terima ditandatangani oleh aparatur desa diketahui oleh camat.

2. **Permintaan Dana Untuk Kegiatan Fisik.**

Ketua TPPK Desa mengajukan Permohonan permintaan dana yang diketahui oleh Kepala Desa dengan surat pengantar dari Camat, untuk diajukan kepada Bapak Bupati Katingan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan, untuk diteliti kelengkapan berkas dan kemudian diterbitkan **Surat Rekomendasi** yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau yang mewakili atas nama Kepala Badan, meminta kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan, untuk menerbitkan SPM dan SP2D. Surat Rekomendasi yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan yang diberikan kepada setiap desa untuk mengusulkan pencairan sebagai bukti syah atas kelengkapan berkas dan sebagai bukti turut bertanggung jawab atas pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Desa.

Pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu **Tahap Pertama** sebesar **35%**, **tahap kedua sebesar 65 %** setelah melalui tahapan - tahapan perencanaan dan evaluasi yang telah ditetapkan oleh Bupati Katingan maka, Desa membuat usulan permintaan dana untuk kegiatan fisik sesuai tahapan, dengan melampirkan :

Tahap I (35%) :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan fisik.
- Susunan pengurus TPPK Desa (SK TPPK Desa)
- SK Bupati Katingan tentang Lokasi Desa penerima dana kegiatan fisik PDM dari Alokasi Dana Desa.
- Daftar Usulan Kegiatan PDM serta Berita Acara hasil Pertemuan /Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- Rekening TPPK Desa penerima dana kegiatan fisik PDM Alokasi Dana Desa atas nama Ketua dan Bendahara TPPK.
- Kuitansi Pembayaran yang tanda terimanya ditandatangani oleh Bendahara TPPK.

Tahap II (65%) :

- Kwitansi Pembayaran yang tanda terimanya ditandatangani oleh Bendahara TPPK.
- Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
 - Dan lain-lain yang dianggap perlu.
 - SPJ Kegiatan.
- Foto kegiatan

VIII. Penyampaian Pertanggung Jawaban Desa

1. Belanja Operasional dan Honorarium / Gaji.

Laporan pertanggung jawaban disampaikan oleh desa, mengacu kepada ketentuan yang berlaku berupa surat Pertanggung Jawaban (SPJK) beserta bukti bukti yang syah dan disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Katingan..

a. Tugas fungsi Aparatur Desa :

- Aparatur desa sebagai pelaksana kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan beserta bukti bukti yang syah sesuai dengan ketentuan laporan

keuangan yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

b. Tugas fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.

- Memeriksa kembali kelengkapan laporan dan mencocokkan bukti - bukti yang syah pengeluaran atas kegiatan desa.
- Mengembalikan berkas SPJK desa apabila belum memenuhi persyaratan tekhnis keuangan terhadap laporan SPJK desa kepada desa bersangkutan, dengan mengeluarkan surat pengembalian berkas yang ditanda tangani oleh Kelapa Dinas atau yang mewakili atas nama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.
- Dalam memeriksa kelengkapan syah tidaknya SPJK desa dapat berkoordinasi / konsultasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Katingan melalui Sub Dinas Akuntansi.
- Berhak menentukan scedul, batas waktu melalui keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bagi Pemerintah Desa untuk menyampaikan laporan kemajuan fisik / keuangan desa dibawah tanggal penyampaian laporan pertanggung jawaban desa kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Katingan dengan tujuan untuk memudahkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban tersebut.
- Berhak meminta / memaksa penanggungjawab kegiatan Desa (Kepala Desa) untuk melaporkan pertanggungjawabannya melalui surat dan atau telegram dan ditembuskan kepada Bupati Cq. DPPKD Kabupaten Katingan, Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan dan Camat setempat.
- Apabila surat pertanggungjawaban dan bukti-bukti lainnya yang syah belum dilaksanakan oleh yang bersangkutan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bersama Camat setempat dapat mendatangi langsung ke desa bersangkutan untuk dilakukan pembinaan.
- Apabila terdapat kejanggalan / kecurangan dalam pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa yang dilakukan oleh aparatur Desa/TPPK, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan laporan kepada Bupati dan

kemudian dianggap perlu Bupati Katingan memerintahkan Banwas Kabupaten Katingan untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- Khusus untuk pertanggungjawaban pembayaran honorarium aparatur desa telah dilakukan pada saat pengajuan permintaan honorarium aparatur desa pada saat pengajuan permintaan pembayaran honorarium aparatur desa (beban LS), namun bukti pembayaran honorarium tersebut juga dilampirkan dan merupakan salah satu bukti dalam laporan pertanggungjawabab akhir pengelola kegiatan desa.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Desa kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan Cq. Subdin Akuntansi per kecamatan paling lambat tanggal 5 Desember 2009 untuk diverifikasi kembali, dan untuk dijadikan salah satu item laporan keuangan daerah atas bantuan keuangan daerah.

c. Tugas fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan :

- Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan dapat meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk mengcross cek kembali kepada desa yang bersangkutan apabila berkas yang disampaikan masih belum lengkap.
- Membuat Nota Pertimbangan kepada Bupati Katingan untuk mengusulkan desa yang berprestasi atas pengelolaan kegiatan dan keuangan desa untuk direkomendasikan mendapat penghargaan dari Pemerintah kabupaten Katingan.
- Membuat Nota Pertimbangan kepada Bupati Katingan untuk mengusulkan desa yang tidak berhasil atas pengelolaan kegiatan dan keuangan desa untuk direkomendasikan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berikutnya mendapat pengurangan / penundaan.

2. Kegiatan Fisik

- Laporan kegiatan fisik merupakan bagian proses pencairan keuangan yang langsung ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan atas dasar rekomendasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Katingan baik berupa uang muka kerja maupun pembayaran terakhir (beban LS).

- Laporan pertanggungjawaban terakhir pemerintahan desa tetap menyertakan laporan kemajuan pekerjaan (laporan kemajuan pekerjaan akhir) disertai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari TPPK kepada Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat setempat beserta fotocopy SP2D fisik desa dan foto-foto kegiatan.
- Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan dengan alamat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan kegiatan fisik sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan kemudian disampaikan paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan Cq. Kasubdin Akuntansi.

VIII. Lain - Lain.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Program Desa Membangun maka akan dilakukan :

1. Pembinaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan.
2. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku dan atau melakukan tuntutan berdasarkan Hukum Pidana dengan jalan menyerahkan kepada pihak yang berwenang.

VII. Penutup.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Program Desa Membangun (PDM), dan hal - hal yang bersifat teknis akan dijelaskan melalui petunjuk lebih lanjut.

Dikeluarkan di Kasongan
pada tanggal, 22 April 2009



BUPATI KATINGAN,

Duwel Rawing
DUWEL RAWING

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Kepala Bappeda Prov. Kal. Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Inspektorat Propv Kal. Tengah di P. Raya.
4. Kepala BPM dan Des Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan
6. Kepala Bappeda Kabupaten Katingan
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
 - a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
 - b. Kepala Bagian Hukum
8. Inspektur Kabupaten Katingan.
9. Camat Se Kabupaten Katingan
10. Kepala Desa/Kelurahan Se Kabupaten Katingan
11. Arsip.

CEKLIS PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN

DESA
Kecamatan

Kabupaten
Propinsi

| No | Uraian | Pemeriksaan Isi Proposal desa | | | | Penjelasan dan rekomendasi |
|----|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | Ada | | | Tidak Ada | |
| | | Layak | Kurang | Salah | | |
| 1 | Cover /Sampul Proposal | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jenis Usulan Kegiatan : 1. Keg. Prasarana <input type="checkbox"/> 2. Keg. Klpk Perempuan <input type="checkbox"/> 3. Keg. Bidang Pendidikan <input type="checkbox"/> 4. Keg. Bidang Kesehatan <input type="checkbox"/> 5. Keg. Bidang Pelatihan <input type="checkbox"/> 6. Keg. Lainnya <input type="checkbox"/> |
| 2 | Surat Pengantar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Peta Sosial Desa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | a. Tanda pada Lokasi Kegiatan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | b. Keterangan Pada Peta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | a. Rekapitulasi Gagasan Kelompok Gabungan /Perempuan yang sudah ditanda tangani lengkap. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | a. Berita Acara Musyawarah DesaPerencana yang sudah ditanda tangani lengkap. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | b. Daftar hadir peserta musyawarah | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | a. Daftar Penetapan Usulan Desa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | b. Tanda tangan Daftar Penetapan Usulan Lengkap dan Asli | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7 | BA/Pernyataan tidak ada ganti rugi dari ADD | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

KESIMPULAN PEMERIKSAAN : Bahwa dokumen usulan/ proposal desa tsb.Diatas dinyatakan :

- 1. TELAH MEMENUHI SYARAT
- 2. BELUM MEMENUHI SYARAT

maka bisa dilanjutkan dgn proses verifikasi.
maka perlu diperbaiki dulu oleh desa.

Dibuat di :,tanggal

| | | | |
|----|------|----------------------------|--------------|
| No | Nama | Diperiksa oleh, Jabatan | Tanda tangan |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

DAFTAR GAGASAN

KELOMPOK / DUSUN.....(Perempuan/Campuran*)

Tahun Anggaran.....

Provinsi : Kecamatan :.....Jumlah
 Pendudukn Jiwa
 Kabupaten : Desa :.....

| NO | Jenis Kegiatan | Target Volume Kegiatan | Lokasi | Jumlah Penerima Manfaat (orang) | Uraian Manfaat | Kesanggupan Swadaya |
|----|----------------|------------------------|--------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Disahkan dalam /

Musyawarah.....

Tanggal

Keterangan :

- Kolom 6 berisi manfaat Yag dapat diperoleh Bila kegiatan tersebut Dilaksanakan.
- Kolom 7 berisi Kesanggupan Swadaya Yang telah Dimusyawarahkan dalam musyawarah kelompok dusun.
- * coret yang tidak perlu

(.....) (.....) (.....)
 Fasilitator Fasilitator TPPK Desa
 Desa/Kader desa Desa/Kader desa

REKAPITULASI GAGASAN KELOMPOK (PEREMPUAN/CAMPURAN *)
Tahun Anggaran.....

Propinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :

| No | Jenis Kegiatan | Terget Volume Kegiatan | Lokasi | Jumlah Penerimaan Manfaat (orang) | Uraian Manfaat | Kesanggupan Swadaya | Gagasan berasal dari |
|----|----------------|------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Kasongan,.....

Keterangan :

1. Kolom 6 berisi manfaat (.....) (.....) (.....)
Yag dapat diperoleh
Bila kegiatan tersebut
Dilaksanakan. **Fasilitator** **Fasilitator** **TPPK Desa**
Desa/Kader desa **Desa/Kader desa**
2. Kolom 7 berisi
Kesanggupan Swadaya
Yang telah
Dimusyawarahkan
dalam musyawarah
kelompok dusun.
3. * coret yang tidak perlu

BERITA ACARA
PERTEMUAN MUSYAWARAH KEGIATANA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
No.....

Dalam rangka pelaksanaan Program Desa Membangun, melalui Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Tahun Anggaran,.....di
Desa.....Kecamatan ,.....Kabupaten,,maka pada :

Hari dan Tanggal :
Jam : Pukuls/d Pukul
Tempat :

Telah diselenggarakan pertemuan/musyawarah membahas masalah Program Desa Membangun (PDM) yang dihadiri oleh wakil –
wakil dari masyarakat,desa serta unsur Tim Perencana dan Pelaksana Kegiatan Desa (TPPK) yang terkait dengan pelaksan Kegiatan
Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat :dari.....
Sekretaris/Notulis :dari.....
Narasumber : 1dari.....
2dari.....
3dari.....
4dari.....
5dari.....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas,selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan
menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari pertemuan/musyawarah,yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal.....

Pemimpin

Natulis / Sekretaris

() ()

Mengetahui :

Kepala Desa/Kelurahan

()
Mengetahui dan menyetujui
Wakil dari peserta musyawarah

| Nama | Alamat | Tanda Tangan |
|---------|--------|--------------|
| 1..... | | |
| 2..... | | |
| 3..... | | |
| 4..... | | |
| 5..... | | |
| 6..... | | |
| 7..... | | |
| 8..... | | |
| 9..... | | |
| 10..... | | |

Dst
Tembusan :

DAFTAR USUL DESA

KELOMPOK / DUSUN.....(Perempuan/Campuran*)

Tahun Anggaran.....

Provinsi :

Kecamatan :.....Jumlah

Pendudukn Jiwa

Desa :.....

Kabupaten :

| NO | Jenis Kegiatan | Target Volume Kegiatan | Lokasi | Jumlah Penerima Manfaat (orang) | Uraian Manfaat | Kesanggupan Swadaya |
|----|----------------|------------------------|--------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Disahkan dalam /

Musyawarah.....

Tanggal

Keterangan :

1. Kolom 6 berisi manfaat Yag dapat diperoleh Bila kegiatan tersebut Dilaksanakan.
2. Kolom 7 berisi Kesanggupan Swadaya Yang telah Dimusyawarahkan dalam musyawarah kelompok dusun.
3. * coret yang tidak perlu

(.....)
Fasilitator
Desa/Kader desa

(.....)
Fasilitator
Desa/Kader desa

(.....)
TPPK Desa

USULAN KEGIATAN

Semua jenis kegiatan desa menggunakan forum berikut ini, jumlah Usulan kegiatan desa berdasarkan hasil kesepakatan MD perencanaan, maksimal 3 usulan)

| | | | | |
|-------------|------|-----------|-----------|----------|
| | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi |
| Usulan dari | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--------------------|-----|------------------------|---------------------------------|
| Nama kegiatan | | | | |
| Jenis kegiatan | | | | |
| Lokasi kegiatan | | | | |
| Kelompok pengusul | Kelompok Perempuan | | Kelompok Campuran | |
| Jumlah pemanfaat | Langsung (orang) | | Tidak Langsung (orang) | |
| | L | Org | L | Org |
| | P | Org | P | Org |
| | JML | Org | JML | Org |
| | | | | Orang Miskinorg% |

1. Latar Belakang :
(Jelas masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi.
2. Tujuan Yang Ingin Dicapai :
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kembali dari masalah.
3. Kegiatan Yang Dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan ADD, Swadaya ataupun sumber lain, kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan).
4. Manfaat Yang Diperoleh
(Jelas manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai, Misalnya terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran /menurunnya angka putus sekolah, dll, dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif).
5. Keterlibatan Kelompok Miskin Dalam Perencanaan
(Jelas bagaimana dan berapa banyak kelompok orang miskin terlibat dalam perencanaan dan dalam penentuan usul ini)
6. Potensi Sumber Daya
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan, termasuk swadaya)
7. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
(Jelas rencana pelaksanaan kegiatan)
8. Rencana Pelestarian Kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutannya setelah dana bantaun ADD berakhir).
9. Lampiran-lampiran
 - a. Peta sosial desa/Propil Desa
 - b. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan
 - c. Daftar Usul Desa
 - d. Lampiran lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan yaitu :
 - Usul (Lampiran : RAB, Gambar dan Jadwal Rencana Kerja)
 - Estimasi sumber pembiayaan, Berita Acara, Pernyataan, tidak ada ganti rugi dari ADD.

Disiapkan Oleh TPU desa

Mengetahui :

..... (Ketua TPPK)
 (Sekretaris TPPK)
 (Tokoh Masyarakat/Kader Desa)

1.Kepala Desa
 2. BPD

ESTIMASI SUMBER PEMBIAYAAN KEGIATAN

| RINCIAN KEGIATAN | SUMBER PEMBIAYAAN | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | ADD (Vol) | SUMBER PEMBIAYAAN | LAINNYA (Vol) |
| 1. Tenaga Kerja | | | |
| 1.1 | | | |
| 1.2 | | | |
| 1.3 | | | |
| 1.4 | | | |
| 2 Bahan | | | |
| 2.1 | | | |
| 2.2 | | | |
| 2.3 | | | |
| 2.4 | | | |
| 2.5 | | | |
| 2.6 | | | |
| 2.7 | | | |
| 2.8 | | | |
| 3. Peralatan | | | |
| 3.1 | | | |
| 3.2 | | | |
| 3.3 | | | |
| 3.4 | | | |
| 3.5 | | | |
| 3.6 | | | |
| 4. Lainnya | | | |
| 4.1 | | | |
| 4.2 | | | |
| 4.3 | | | |
| 4.4 | | | |

Wakil Masyarakat /Kelompok Pengusul

Tanggal,

1

KETUA TPPK,

2

(.....)

DAFTAR USUL RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2009
(Sumber Alokasi Dana Desa/Kelurahan)

Kecamatan :
Desa :

| No | Jenis Kegiatan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Biaya | Keterangan |
|----|--------------------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Belanja Operasional Desa | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Belanja Modal | | | | |
| 4 | Belanja Pemeliharaan | | | | |
| 5 | Bantuan PKK | | | | |
| 6 | Biaya Operasional BPD | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI KEGIATAN (PJAK)

PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :

Kepala Desa,.....

DAFTAR USUL RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2009
(Sumber Alokasi Dana Desa/Kelurahan)

Kecamatan :
Desa :

| No | Jenis Kegiatan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Biaya | Keterangan |
|----|--------------------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Belanja Operasional Desa | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Belanja Modal | | | | |
| 4 | Belanja Pemeliharaan | | | | |
| 5 | Bantuan PKK | | | | |
| 6 | Baiaya Operasional BPD | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

PENANGGUNG JAWAB ADMNISTRASI KEGIATAN (PJAK)

PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :

Camat,.....

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2009
(Sumber Alokasi Dana Desa/Kelurahan)

Kecamatan :
Desa :

| No | Jenis Kegiatan | Volume | Pagu Dana | Realisasi | | Realisasi Fisik (%) | Realisasi Keuangan (%) | Ket |
|----|--------------------------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------|------------------------|-----|
| | | | | Tahap I | Tahap II | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Belanja Operasional Desa | | | | | | | |
| 2 | Belanja Modal | | | | | | | |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | | | | | | | |
| 4 | Bantuan Untuk PKK | | | | | | | |
| 5 | Biaya Operasional BPD | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | | |

.....2009

PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI KEGIATAN (PJAK)

PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :

Kepala Desa,.....

FORMULIR VERIFIKASI USULAN

Kabupaten :
Kecamatan :

Desa :
Jenis Kegiatan :

| Kriteria | | Penilaian | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Baik | Cukup | Kurang | Ya | Tidak |
| 1.1 | Umum Usulan Kelompok perempuan/pemanfaatan benar-benar berasal dari perempuan/pemanfaatan dan dibahas serta disetujui dalam musyawarah kelompok Perempuan/Pemanfaatan Catatan : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Usulan kegiatan telah dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa Perencanaan Catatan : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Usul kegiatan tidak termasuk dalam daftar negatif (Kegiatan Yang dilarang) sesuai dengan PTO. Catatan : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Usul Kegiatan tidak tumpang tindih dengan proyek/program lain. Catatan : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.5 | Ada masalah dengan kepemilikan tanah/ganti rugi Catatan : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.6 | Kelompok perempuan/pemanfaatan dan orang miskin ikut dalam pembuatan dan pengembalian keputusan mengenai usulan yang diajukan Catatan : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.7 | Ada daftar penerimaan manfaat dan daftar tersebut sesuai dengan jumlah penerimaan manfaat yang ditentukan dilapangan Catatan : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.8 | Calon penerima manfaat lebih banyak dari golongan miskin Catatan : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Kriteria | | Penilaian | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.9 | Kegiatan yang diusulkan menjadi kebutuhan masyarakat dan mendesak untuk dilaksanakan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Catatan : | | | | | | |
| 1.10 | Dalam masyarakat cukup banyak yang mempunyai pengalaman atau bisa mengerjakan kegiatan yang diusulkan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Catatan : | | | | | | |
| 1.11 | Sumber daya yang ada dimasyarakat cukup memadai termasuk adanya potensi swadaya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Catatan : | | | | | | |
| 1.12 | Sudah ada rencana untuk pemeliharaan/pengembangan atau pelestarian kegiatan yang cukup realistis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Catatan : | | | | | | |
| 1.13 | Potensi untuk dikembangkan atau dapat berkelanjutan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Catatan : | | | | | | |

Rekomendasi / Catatan

.....

Tanggal,.....2009

Dibuat Oleh Tim Verifikasi

1.
2.
3.
4.
5.

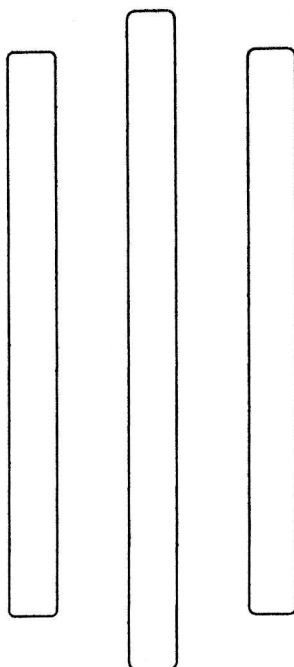


Contoh

PERATURAN DESA.....
KECAMATAN.....

KABUPATEN KATINGAN
Nomor : Tahun 2009

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2009

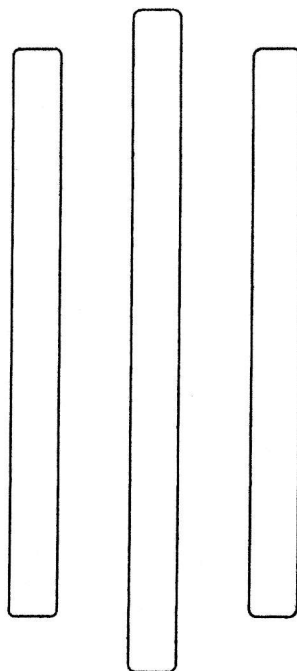


Contoh

PERATURAN DESA.....
KECAMATAN.....

KABUPATEN KATINGAN
Nomor : Tahun 2009

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2009

PERATURAN DESA
KECAMATAN.....

Nomor : Tahun 2009

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bersama Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Katingan telah menyusun Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2008.
 - b. bahwa penyusunan sebagaimana huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa tentang APBDes, tahun anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Katingan.
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Tahun 2009 tentang Keuangan Desa.

Dengan persetujuan bersama
Badan Permusyawaratan Desa
Desa.....
Dan Kepala Desa
Kecamatan.....
Kabupaten Katingan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan DesaKecamatan.....Kabupaten Katingan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Desa Rp.....
- 2. Belanja Desa Rp.....
- 3. Defisit/Surplus Rp.....
- 4. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Rp.
 - b. Pengeluaran Rp.
- Pembiayaan Netto Rp.
- Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan Rp.

Pasal 2

Kepala Desa,.....Kecamatan,Kabupaten Katingan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Agar setiap orang mengetahui

Ditetapkan di Desa,.....

Pada tanggal,2009

KEPALA DESA.....

Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal : 24 Juli 2007
Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN

| KODE REKENING | URAIAN | TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN | KET |
|---------------|---|------------------|----------------|-----|
| 1 | PENDAPATAN | | | |
| 1.1 | Pendapat Asli Desa | | | |
| 1.1.1 | Hasil Usaha Desa | | | |
| | Dst..... | | | |
| 1.1.2 | Hasil Pengelolaan Kekayaan desa | | | |
| 1.1.2.1 | Tanah Kas Desa (*) | | | |
| 1.1.2.1.1 | Tanah Desa | | | |
| 1.1.2.1.2 | Dst | | | |
| 1.1.2.2 | Pasar Desa | | | |
| 1.1.2.3 | Pasar Hewan | | | |
| 1.1.2.4 | Tambahan Perahu | | | |
| 1.1.2.5 | Bangunan desa | | | |
| 1.1.2.6 | Pelealangan ikan yang dikelola desa | | | |
| 1.1.2.7 | Lain-lain Kekayaan milik Desa | | | |
| 1.1.2.8 | Dst | | | |
| 1.1.3 | Hasil Swadaya dan Partisipasi | | | |
| 1.1.3.1 | Dst | | | |
| 1.1.4 | Hasil gotong royong | | | |
| 1.1.4.1 | Dst | | | |
| 1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | |
| 1.1.5.1 | Dst | | | |
| 1.2 | Bagi Hasil Pajak | | | |
| 1.2.1 | Bagi hasil pajak Kabupaten/kota | | | |
| 1.2.2 | Bagi hasil PBB | | | |
| 1.2.3 | Dst | | | |
| 1.3 | Bagi Hasil Retribusu | | | |
| 1.3.1 | Dst | | | |
| 1.4 | Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah | | | |
| 1.4.1 | ADD | | | |
| 1.4.2 | Dst | | | |
| 1.5 | Bantuan Keuangan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya. | | | |
| 1.5.1 | Bantuan Keuangan Pemerintah | | | |
| 1.5.1.1 | Dst | | | |
| 1.5.3 | Bantuan Keuangan Pemerintahan Provinsi | | | |
| 1.5.2.1 | Dst | | | |
| 1.5.3 | Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| 1.5.3.1 | Dana tambahan penghasil tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | |
| 1.5.3.2 | Dst | | | |
| 1.5.4 | Bantuan Keuangan Desa lainnya | | | |
| 1.5.4.1 | Dst | | | |
| 1.6 | Hibah | | | |
| 1.6.1 | Hibah dari pemerintah | | | |
| 1.6.2 | Hibah dari pemerintah Provinsi | | | |
| 1.6.3 | Hibah dari pemerintah Kabupaten/kota | | | |
| 1.6.4 | Hibah dari Badan/lembaga/organisasi/swasta | | | |
| 1.6.5 | Hibah dari masyarakat/perorangan | | | |
| 1.6.6 | Dst | | | |
| 1.7 | Sumbangan Pihak Ketiga | | | |
| 1.7.1 | Sumbangan dari | | | |
| 1.7.2 | 1.6.2 | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | |
| 2 | BELANJA | | | |
| 2.1 | Belanja Langsung | | | |
| 2.1.1 | Belanja pegawai/Honorrarium | | | |

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| 2.1.1.1 | Honor Tim/Panitia | | | |
| 2.1.1.2 | Dst | | | |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan jasa | | | |
| 2.1.2.1 | Belanja perjalanan dinas | | | |
| 2.1.2.2 | Belanja bahan material | | | |
| 2.1.2.3 | Dst | | | |
| 2.1.3 | Belanja modal | | | |
| 2.1.3.1 | Belanja modal tanah | | | |
| 2.1.3.2 | Belanja modal jaringan | | | |
| 2.1.3.3 | Dst | | | |
| 2.2 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.2.1 | Belanja pegawai /Penghasilan Tetap | | | |
| 2.2.1.1 | Dst | | | |
| 2.2.3 | Belanja Hibah | | | |
| 2.2.3.1 | Dst | | | |
| 2.2.4 | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 2.2.4.1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | |
| 2.2.4.2 | Dst | | | |
| 2.2.5 | Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| 2.2.5.1 | Dst | | | |
| 2.2.6 | Belanja tidak tertuga | | | |
| 2.2.6.1 | Keadaan darurat | | | |
| 2.2.6.2 | Bencana alam | | | |
| 2.2.6.3 | Dst | | | |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | | | |
| 3.1.1 | Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya | | | |
| 3.1.2 | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan | | | |
| 3.1.3 | Penerimaan Pinjaman | | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran utang | | | |

Tanggal,.....2009

KEPALA DESA,

Catatan : Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi sara, Sugh Dayoh, Bangkok, Bondo Desa, Kokoan, Timbul, Panganon, Tanah Pembelian Desa, dsb.

(.....)

Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor : 37 Tahun 2007
 Tanggal : 24 Juli 2007
 Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

BUKU KAS UMUM
 DESA.....KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN 2009

| No | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) |
|----|---------|---------------|--------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | JUMLAH | | | |

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| Jumlah bulan/tanggal | Rp..... | Rp..... |
| Jumlah sampai bulan lalu/tanggal | Rp..... | Rp..... |
| Jumlah semua s/d bulan/tanggal | Rp..... | Rp..... |
| Sisa Kas | | Rp..... |

Pada hari ini tanggal,2009

Oleh kami didapat dalam Kas Rp.....(Dengan huruf)

Terdiri dari :

| | | |
|----------------|---------|--|
| Tunai | Rp..... | |
| Saldo Bank | Rp..... | |
| Surat Berharga | Rp..... | |

MENGETAHU :
KEPALA DESA,

Tanggal,.....2009
BENDAHARA DESA,

Cara Penqisian :

- Kolom 1 diisi dengan no urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas



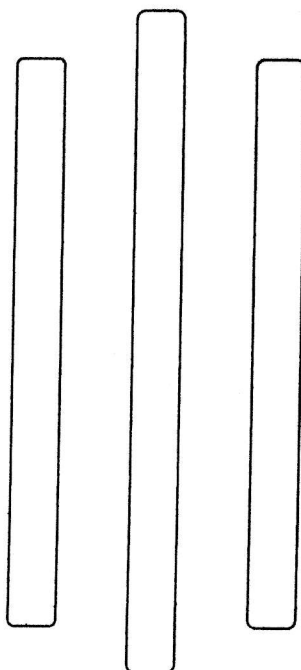
Contoh

DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
(DPKD)

DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN KATINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2009

| | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|---|------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA | | Nomor DPKD | | | | FORMULIR 8 |
| | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Urusan : PJAK Kegiatan : Honorarium Non PNS/Honorarium Aparatur Desa Waktu Pelaksanaan : 12 bulan Sumber Dana : Desa.....Kecamatan..... Sumber Dana : ADD | | | | | | |

| RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------|-------------|-------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | |
| | | Volume | Satuan | Tarif/harga | Jumlah (Rp) |
| 5 | Belanja Desa | | | | |
| 5.2 | Belanja langsung | | | | |
| 5.2.1.02.02 | Honorarium aparatur desa | | | | |
| | Kepala desa | | | | |
| | Sekretaris Daerah | | | | |
| | Kepala urusan 3 orang x Rp. 450.000 | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

Desa,.....

Sekretaris Desa,

.....

| DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA | Nomor DPKD | | | | FORMULIR 8 |
|--|------------|---|---|---|------------|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | | |
| Urusan : PIAK Kegiatan : Tunjangan Peningkatan Penghasilan Aparatur Desa Waktu Pelaksanaan : 12 bulan Sumber Dana : Desa.....Kecamatan..... Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | | | | |

| RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|-------------|-------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | |
| | | Volume | Satuan | Tarif/harga | Jumlah (Rp) |
| 5 | Belanja Desa | | | | |
| 5.2 | Belanja langsung | | | | |
| 5.2.1. | Belanja Non Pegawai | | | | |
| 5.2.1.02.02 | Tunjangan Peningkatan Penghasilan Aparatur Desa | | | | |
| | Kepala Desa | | | | |
| | Sekretaris Desa | | | | |
| | Kepala urusan 3 orang x Rp. 450.000 | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

Desa,.....

Sekretaris Desa,

.....

| | | | | | |
|---|------------|---|---|---|------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA | Nomor DPKD | | | | FORMULIR 8 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Urusan : PJAK Kegiatan : Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur desa dan BPD Waktu Pelaksanaan : 12 bulan Sumber Dana : Desa.....Kecamatan..... Sumber Dana : ADD/DAUD | | | | | |

| RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|-------------|-------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | |
| | | Volume | Satuan | Tarif/harga | Jumlah (Rp) |
| 5 | Belanja Desa | | | | |
| 5.2 | Belanja langsung | | | | |
| 5.2.1. | Belanja Non Pegawai | | | | |
| 5.2.1.05 | Kursus-kursus singkat, pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis, kursus-kursus singkat/pelatihan | | | | |
| 5.2.1.05.02 | Kontribusi pelatihan administrasi alokasi dana desa | | | | |
| | | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

Desa,.....

Sekretaris Desa,

.....

| DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA | | Nomor DPKD | | | | FORMULIR 8 |
|---|--|------------|---|---|---|------------|
| | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Urusan : PJAK Kegiatan : Operasional Desa Waktu Pelaksanaan : 12 bulan Sumber Dana : Desa.....Kecamatan..... Sumber Dana : ADD/DAUD | | | | | | |

| RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|-------------|-------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | |
| | | Volume | Satuan | Tarif/harga | Jumlah (Rp) |
| 5 | Belanja Desa | | | | |
| 5.2 | Belanja langsung | | | | |
| 5.2.1. | Belanja Non Pegawai | | | | |
| 5.2.1.02.01 | Honorarium tenaga ahli dan narasumber | 12 | HOK | | |
| | Upah petugas pemeliharaan jalan dan halaman kantor desa | | | | |
| 5.2.2 | Belanja barang dan jasa | | | | |
| 5.2.2.01.01 | Belanja bahan pakai habis | | | | |
| | Belanja alat tulis kantor | 12 | Rim | | |
| | Kertas HVS | | | | |
| | Bolpin Pilot | | | | |
| | Stop map polio batik | | | | |
| | Pita mesin tik | | | | |
| | Karbo Daito | | | | |
| | Bantal cap | | | | |
| | Stop Map biasa | | | | |
| | Stempel desa | | | | |
| | Map Odner | | | | |
| 5.2.2.01.03 | Belanja alat Listrik dan elektronik | | | | |
| | Belanja lampu pijar | | | | |
| | Saklar | | | | |
| | Tempel jek | | | | |
| 5.2.2.01.04 | Belanja perangko, metrai dan benda pos lainnya. | | | | |
| | Belanja metrai 6000 | | | | |
| | Belanja metrai 3000 | | | | |
| 5.2.2.02 | Belanja bahan material | | | | |
| 5.2.2.02.05 | Belanja bahan kimia | | | | |
| | Belanja Herbisida | | | | |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa kantor | | | | |
| 5.2.2.03.03 | Belanja listrik | 1 | bulan | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Tarif/harga | Jumlah (Rp) |
| 5.2.2.06 | Belanja cetak dan penggandaan | | | | |
| 5.2.2.06.01 | Belanja cetak | | | | |
| | Cetak Kop Surat | | | | |
| | | | | | |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | | | | |
| | Biaya Fotocopi | | | | |
| | | | | | |
| 5.2.2.11 | Belanja makan dan minum | | | | |
| | Belanja makan dan minum harian | | | | |
| | Belanja makan dan minum /Rapat | | | | |
| | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten | | | | |
| | | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

Desa,.....

Sekretaris Desa,

.....

| | | | | | |
|---|------------|---|---|---|------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA | Nomor DPKD | | | | FORMULIR 8 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Urusan : PIAK Kegiatan : Operasional Desa Waktu Pelaksanaan : 12 bulan Sumber Dana : Desa.....Kecamatan..... Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | | | | |

| RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA | | | | | |
|---|--|---------------------|--------|-------------|-------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | |
| | | Volume | Satuan | Tarif/harga | Jumlah (Rp) |
| 5 | Belanja Desa | | | | |
| 5.2 | Belanja langsung | | | | |
| 5.2.3 | Belanja Modal | | | | |
| 5.2.3.09.12 | Belanja Modal Pengadaan alat-alat Pertanian/Peternakan | | | | |
| | Belanja modal pengadaan Hansprayer | 2 | Unit | | |
| 5.2.3.10 | Belanja modal pengadaan peralatan kantor | | | | |
| 5.2.3.10.01 | Belanja modal mesin tik | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

Desa.....

Sekretaris Desa,

.....

| | | | | | | |
|--|--|------------|---|---|---|------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA | | Nomor DPKD | | | | FORMULIR 8 |
| | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Urusan : PJAK Kegiatan : Operasional BPD Waktu Pelaksanaan : 12 bulan Sumber Dana : Desa.....Kecamatan..... Sumber Dana : ADD/DAUD | | | | | | |

| RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|-------------|-------------|--|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | |
| | | Volume | Satuan | Tarif/harga | Jumlah (Rp) | |
| 5 | Belanja Desa | | | | | |
| 5.2 | Belanja langsung | | | | | |
| 5.2.1. | Belanja Non Pegawai | | | | | |
| 5.2.1.02.01 | Honorarium tenaga ahli dan narasumber | 12 | HOK | | | |
| | Upah petugas pemeliharaan jalan dan halaman kantor desa | | | | | |
| 5.2.2 | Belanja barang dan jasa | | | | | |
| 5.2.2.01.01 | Belanja bahan pakai habis | | | | | |
| | Belanja alat tulis kantor | 12 | Rim | | | |
| | Kertas HVS | | | | | |
| | Bolpin Pilot | | | | | |
| | Stop map polio batik | | | | | |
| | Pita mesin tik | | | | | |
| | Karbo Daito | | | | | |
| | Bantal cap | | | | | |
| | Stop Map biasa | | | | | |
| | Stempel desa | | | | | |
| | Map Odner | | | | | |
| 5.2.2.01.03 | Belanja alat Listrik dan elektronik | | | | | |
| | Belanja lampu pijar | | | | | |
| | Saklar | | | | | |
| | Tempel jek | | | | | |
| 5.2.2.01.04 | Belanja perangk, metrai dan benda pos lainnya. | | | | | |
| | Belanja metrai 6000 | | | | | |
| | Belanja metrai 3000 | | | | | |
| 5.2.2.02 | Belanja bahan material | | | | | |
| 5.2.2.02.05 | Belanja bahan kimia | | | | | |
| | Belanja Herbisida | | | | | |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa kantor | | | | | |
| 5.2.2.03.03 | Belanja listrik | 1 | bulan | | | |

Desa,.....

Sekretaris Desa,

.....